



Media Title	Kompas		
Head Line	TOL TRANS-SUMATERA, Sudah Harga Mati		
Date	26 Feb 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	17	Article Size	
Journalist	M Clara Westi	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

TOL TRANS-SUMATERA Sudah Harga Mati

Harapan masyarakat Sumatera untuk terwujudnya Jalan Tol Trans-Sumatera agaknya harus sedikit ditekan. Peran JTTS sangat penting karena akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Masyarakat juga tidak akan kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosialnya. Apabila JTTS dibangun, keinginan Indonesia menjadi negara maju dengan produk domestik bruto mencapai 4-4,5 triliun dollar AS akan semakin cepat terwujud.

Namun, membangun JTTS tidaklah mudah karena dibutuhkan dana yang sangat besar. Untuk membangun jalan sepanjang 2.608 kilometer itu dibutuhkan biaya Rp 350 triliun. Pemerintah tidak mungkin membangun sendiri. Namun, untuk menawarkan kepada swasta juga akan berat karena jalan tol itu hanya mempunyai nilai ekonomi, tetapi nilai finansialnya rendah. Swasta hanya mau bergabung jika melihat ada keuntungan di sana, minimal keuntungan yang didapat (*internal rate of return/IRR*) di atas 15 persen. Sementara dari 23 ruas JTTS, hanya ada empat ruas yang mempunyai IRR di atas 15 persen. Sisanya hanya mempunyai IRR di bawah 10 persen.

Karena IRR yang rendah itu, pemerintah memutuskan memberi penugasan kepada PT Hutama Karya (HK) untuk membangun jalan tol ini. Kontraktor ini 100 persen dimiliki pemerintah sehingga bisa menjalankan penugasan. Adapun Jasa Marga, yang sudah berpengalaman di jalan tol, tidak bisa diberi penugasan karena sudah perusahaan publik.

Namun, memberikan penugasan kepada HK juga harus dilakukan dengan hati-hati dan terbuka. Bisa saja kontraktor pelat merah yang lain bilang, kenapa bukan kami? Bukankah untuk proyek-proyek infrastruktur yang ada selama ini biasanya pemerintah melakukan tender terbuka?

Lalu, jika penugasan, itu berarti pemerintah harus memberikan penyertaan modal negara (PMN) dari APBN. Diperkirakan PMN itu sebesar 30 persen, atau Rp 70 triliun. Di lain pihak, jalan tol bukanlah infrastruktur dasar sehingga kurang tepat jika diberi PMN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berulang kali menegaskan, APBN hanya boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, dan jalan. Apabila HK mendapatkan dukungan dana dari APBN, pemerintah harus membuat payung hukum yang diakui semua pihak bahwa hal itu telah dilakukan dengan cara-cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, HK sudah mendapatkan anggaran PMN sebesar Rp 2 triliun dalam APBN-P 2013. Namun, proses penganggaran pada waktu itu belum sesuai dengan prosedur penetapan anggaran di DPR karena belum pernah dibahas dan mendapat persetujuan dari Komisi VI DPR yang membidangi BUMN. Akibatnya, meskipun Undang-Undang APBN-P 2013 telah disahkan, Komisi VI DPR pada waktu itu tetap menolak tambahan PMN kepada HK sebesar Rp 2 triliun untuk pengusahaan Jalan Tol Trans-Sumatera.

Namun, masalah kelayakan secara finansial ini juga patut diuji kembali. Apakah benar, saat ini kondisinya masih belum layak? Bisa saja, karena pertumbuhan yang terjadi saat ini, di beberapa ruas, nilai finansialnya muncul. Oleh karena itu, ada baiknya jika ditenderkan kembali. Siapa tahu ada swasta yang tertarik ikut dalam pembangunan JTTS sehingga mengurangi beban APBN.

Kementerian Pekerjaan Umum saat ini sedang mencari cara bagaimana pembangunan JTTS ini bisa terwujud. Untuk mewujudkannya, saat ini Kementerian PU sedang mencoba menenderkan ruas-ruas yang secara finansial menarik bagi swasta. Hingga saat ini, sudah ada ruas Medan-Kualanamu dan Medan-Dumai yang akan ditawarkan kepada investor.

Ke depan, pemerintah akan meneruskan dengan membangun ruas tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (126 kilometer), ruas tol Lampung-Terbanggi (40 km), ruas tol Palembang-Indralaya (58,5 km), dan ruas tol Kualanamu-Tebtingtinggi (40 km).

Pembangunan JTTS memang sangat penting. Sudah harga mati. Tidak ada yang meragukannya. Namun, pembangunannya jangan mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua harus bisa dijawab dengan baik agar tidak ada lagi yang diseret-seret ke pengadilan di kemudian hari karena salah langkah. Kurang elok jadinya. (M CLARA WRESTD)



HANDLING